



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ANTRIAN BBM AKIBAT DISPARITAS HARGA

Lisnawati

Peneliti Muda

lisnawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Seperti diketahui, Pertamina resmi menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Non Subsidi Gasolin RON 92 (Pertamax) mulai 1 April 2022. BBM Pertamax disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter (untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5%).

Dalam keterangan resminya, Pertamina menaikkan harga BBM Pertamax karena harga minyak dunia semakin mahal. Meskipun harga BBM Pertamax naik, namun Pertamina mengklaim harga tersebut masih di bawah harga keekonomian.

Sedangkan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebesar 83%, tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil di harga Rp7.650 per liter (Pertalite) dan Rp5.150 per liter (Solar Subsidi). Hal ini merupakan kontribusi Pemerintah bersama Pertamina dalam menyediakan bahan bakar dengan harga terjangkau.

Kenaikan harga BBM non subsidi, yang mencakup Pertamax, telah memperlebar disparitas harga dengan bensin bersubsidi. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri. Pertama, jika perbedaan harga dunia dengan harga domestik terlalu jauh, maka akan terdapat potensi penyelundupan. Kedua, jika harga BBM non subsidi dan BBM subsidi maka akan terjadi migrasi dari konsumen yang biasa mengonsumsi BBM non subsidi beralih ke konsumen bersubsidi.

Kedua permasalahan ini akan menyebabkan antrian BBM bersubsidi di beberapa titik SPBU. Antrian ini disinyalir akan bertambah seiring dengan pulihnya aktivitas logistik kendaraan angkutan dan ekonomi masyarakat.

Terkait solar, penyaluran Solar subsidi sesuai regulasi Perpres No. 191 Tahun 2014. Volume Solar subsidi mengikuti alokasi yang diberikan pemerintah. Saat ini Pertamina sudah menyalurkan 11 persen kelebihan kuota untuk mengurangi antrean.

Atensi DPR

Dengan adanya kelangkaan BBM bersubsidi di Pemerintah perlu memperhatikan dampaknya di masyarakat. Antrean BBM harus menjadi pelajaran semua pihak.

DPR RI, khususnya Komisi VI DPR RI sebagai mitra Pertamina dalam melakukan tugas pengawasannya harus memastikan bahwa stok BBM bersubsidi cukup dan tidak terjadi antrean di SPBU lainnya.

Secara teori, perilaku panik konsumen cenderung tidak terduga. Ini harus diantisipasi produsen agar antrean tidak terjadi lagi. Sebaiknya sebelum terjadi kenaikan harga, stok BBM harus dipersiapkan.

Meskipun Pertamina menjamin stok pertalite dan solar bersubsidi aman dan tersedia untuk 17 hari ke depan, namun pendistribusiannya harus merata apalagi beberapa hari ke depan akan terjadi lonjakan aktivitas masyarakat yang akan melakukan mudik dalam menghadapi hari raya Idul Fitri.

Tanpa adanya jaminan dan kepastian stok solar dan Pertalite dari Pemerintah bersama Pertamina maka hal tersebut akan dapat mengganggu dan berdampak terhadap shock terhadap perekonomian dan kegiatan masyarakat. Disinilah letak peran vital dari DPR RI khususnya Komisi VI.

SUMBER

Kompas, Rabu 6 April 2022

Bisnis Indonesia, Kamis 7 April 2022

Minggu ke-1 APRIL
(1 s.d. 7 April 2022)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Riyadi Santoso
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Nidya Waras Sayekti

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.